

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap individu tidak saja harus menegakkan hukum dalam sikap dan perbuatannya, tetapi juga perlu menegakkan norma-norma lain, seperti norma kesusilaan dan norma agama. Banyak norma-norma agama yang tanpa disadari telah diadopsi ke dalam norma-norma kesusilaan. Oleh karena itu melanggar norma-norma kesusilaan dapat dinilai sekaligus melanggar norma agama.¹ Norma-norma kesusilaan bertujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal kesopanan setiap orang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai kesusilaan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat dapat mencerminkan sifat dan karakter dari suatu lingkungan masyarakat bahkan suatu bangsa.

Tindak pidana pornografi memang tidak dapat dipungkiri telah menyerang nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. Masalah pornografi merupakan perkara serius yang dapat menghancurkan moral bangsa dan dampaknya sangat berbahaya bagi masyarakat dan generasi muda. Di sisi lain ketika penemuan teknologi informasi terus berkembang dalam skala masal, teknologi itu kemudian telah merubah bentuk masyarakat dari masyarakat dunia lokal menjadi masyarakat dunia global. Teknologi secara fungsional telah menguasai masyarakat, bahkan pada fungsi substansial, seperti mengatur

¹ Adami Chazawi, 2013, *Tindak Pidana Pornografi*, Malang: Bayumedia Publishing. Hlm. 6.

beberapa sistem norma di masyarakat.² Perkembangan teknologi secara nyata telah mempengaruhi masuknya budaya-budaya asing hal ini dapat dilihat dari hal-hal berbau porno saat ini telah memenuhi iklan, dunia modeling, film, musik, majalah, televisi, dll dapat dikatakan pornografi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern.

Dalam realitas di lapangan, walaupun pornografi telah ditegaskan dalam Undang-undang Pornografi dan ITE tindak pidana pornografi masih merupakan suatu problema serius yang menyita perhatian dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Tindak pidana pornografi sendiri di dalam masyarakat masih terdapat penyimpangan seperti kasus yang dimana Polda Jateng berhasil mengungkap kasus ekplotasi anak dan pornografi di kota semarang, dimana 7 tersangka ditangkap yang terdiri dari satu tersangka sebagai manajer tempat hiburan dan tersangka lainnya bertugas penyedia anak-anak di bawah umur sebagai penari *striptease*.³

Dari kasus sebagaimana yang telah diruaikan di atas, menunjukan apabila tindak pidana pornografi bukanlah menjadi perkara yang sederhana karena tindak pidana pornografi ibarat fenomena gunung es tampak seperti masalah kecil tetapi sesungguhnya masalah yang besar. Oleh karena itu aparat kepolisian, dalam hal ini polisi sebagai aparat pelaksana dan penegak peraturan perundang-undangan harus segera menanggulangi tindak pidana pornografi dengan serius.

² Burhan Bungin, 2003, *Pornomedia*, Jakarta Timur: Prenada Media, hlm. xiv

³ [Googleweblught.com/i?u=http://tribatanews.polri.go.id/p%3D103617&hl-ID](http://tribatanews.polri.go.id/p%3D103617&hl-ID), Diakses pada hari, 22 Mei 2018, Pukul 09:00 WIB.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian dengan judul: “UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM MASYARAKAT OLEH KEPOLISIAN DI SEMARANG”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji dan diteliti sebagai berikut:

1. Apa faktor yang mempengaruhi tindak pidana pornografi di Semarang?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pornografi oleh kepolisian di Semarang?
3. Apa hambatan polisi dalam menanggulangi tindak pidana pornografi di Semarang?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tindak pidana pornografi di Semarang
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pornografi oleh kepolisian di Semarang.
3. Untuk mengetahui hambatan polisi dalam menanggulangi tindak pidana pornografi di Semarang

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai salah satu sarana guna penyusunan skripsi untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana di bidang Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum khususnya berkaitan dengan tindak pidana pornografi dalam masyarakat
- b. Bagi masyarakat: Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai upaya penanggulangan kejahatan pornografi oleh kepolisian, serta mengetahui bahwa dalam usaha penanggulangan tersebut aparat juga menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaannya, masyarakat awam dapat mengetahui pentingnya bekerjasama dengan aparat yang berwajib dalam pengungkapan terjadinya kasus tindak pidana pornografi.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Perkembangan teknologi dan informasi menciptakan berbagai dampak positif dan negatif, dampak negatif dari perkembangan dan teknologi ini memunculkan masalah baru seperti pornografi. Pornografi sangat erat

kaitannya dengan masalah norma moral, agama dan kesusilaan. Pornografi saat ini sangat mudah untuk ditemui dalam media internet, media sosial, tayangan televisi, majalah dan selain dampak teknologi itu sendiri tindak pidana pornografi juga dengan mudah di temui di dalam lingkungan masyarakat. Generasi muda saat ini sudah sangat tanggap menggunakan produk teknologi tidak jarang jatuh terpengaruh dalam pornografi. Selain itu juga pengaruh lingkungan masyarakat juga tak kalah mempengaruhi adanya tindak pidana pornografi baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun yang dilakukan oleh generasi muda itu sendiri, oleh karena itu tindak pidana pornografi dapat menimbulkan masalah sosial yang berhubungan dengan hukum selain itu masalah-masalah sosial yang lain yang akan merusak keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dapat dilakukan dengan 2 cara,yaitu mencakup tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan. tindakan preventif merupakan tindakan untuk menginternalisasi norma-norma yang baik ke dalam diri seseorang yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan sedangkan tindakan represif adalah usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap akibat tindak kejahatan yang sedang terjadi (penanganan).

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini berbentuk deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang berkaitan dengan upaya yang diambil kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pornografi di Semarang.

2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁴ Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan upaya dihubungkan terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di POLDA JATENG. pengambilan lokasi di POLDA JATENG ini dengan pertimbangan apabila adanya sumber data yang dimungkinkan untuk diperoleh dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

4. Sumber Data

Data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu :

a. Data Primer

⁴ Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Afabeta, hlm. 53.

Data primer yaitu data yang berupa fakta atau kenyataan atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian. Data Primer diperoleh penulis disini adalah dari hasil wawancara di POLDA JATENG.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yakni:

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP),
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pornografi,
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu berupa buku buku, makalah, dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan tindak pidana Pornografi.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang mana memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, internet, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan dengan cara mencari, mempelajari, memahami, dan menguraikan data-data sekunder yang menunjang penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan penyidik Kepolisian POLDA JATENG tentang hal yang berkaitan dengan tindak pidana Pornografi yang terjadi di masyarakat.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu analisis kualitatif. Data hasil penelitian tersebut dianalisis, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu dengan meneliti terhadap sebagian kecil kasus tindak pidana pornografi, untuk menyimpulkan tindak pidana pornografi pada umumnya.

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Sistematika skripsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara garis besar, mengenai inti isi yang diinginkan penulis untuk setiap bab maupun bagian-bagian di dalam bab tersebut. Sistematika skripsi ini terdiri dari empat bab:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang mencakup tinjauan umum tentang pengertian pornografi, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang kepolisian, Tinjauan Umum Tentang Teori Penanggulangan Kejahatan, Tinjauan Umum Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat uraian tentang hasil penelitian meliputi faktor penyebab tindak pidana pornografi, upaya penanggulangan tindak pidana pornografi oleh polisi di Semarang, serta hambatan polisi dalam menaggulangi tindak pidana pornografi di Semarang.

Bab IV Kesimpulan dan Saran, yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan.

Daftar Pustaka

Lampiran